

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada era otonomi daerah seperti sekarang ini, setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah sebagian besar dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Tidak heran apabila kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah suatu daerah akan berbeda dengan pemerintah daerah yang lain. Hal ini tergantung dari visi yang dibuat oleh masing-masing kepala daerah, mulai dari Gubernur, Wali Kota dan Bupati.

Namun yang jelas bahwa setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah itu harus berdampak nyata kepada masyarakat. Agar masyarakat merasa nyaman untuk tinggal dan diperhatikan oleh pemimpinnya. Ketika masyarakat sudah merasa nyaman atas kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah tersebut, maka hal tersebut merupakan sebuah keberhasilan atas kebijakan publik yang telah dirumuskan. Setelah kebijakan itu telah sukses dirumuskan oleh pemerintah, maka langkah selanjutnya adalah mengeksekusi kebijakan tersebut agar kebijakan tersebut bukan hanya konsep saja, melainkan dapat diaplikasikan kepada masyarakat sebagai target dari kebijakan yaitu yang berada pada proses implementasi kebijakan.

Implementasi kebijakan secara konvensional dilakukan oleh negara melalui badan-badan pemerintah. Sebab implementasi kebijakan publik pada dasarnya merupakan upaya pemerintah untuk melaksanakan salah satu tugas pokoknya, yakni

memberikan pelayanan publik (*public services*). Namun pada kenyataannya implementasi kebijakan publik yang beraneka ragam, baik dalam hal bidang, sasaran dan bahkan kepentingan, memaksa pemerintah menggunakan kewenangan diskresi, untuk menentukan apa yang harus dilakukan mereka dan apa yang tidak.¹

Implementasi kebijakan yang telah melalui tahap rekomendasi merupakan prosedur yang relatif kompleks, sehingga tidak selalu ada jaminan bahwa kebijakan tersebut akan berhasil dalam penerapannya. Keberhasilan implementasi kebijakan sangat terkait dengan beberapa aspek, diantaranya; pertimbangan para pembuat kebijakan, komitmen dan konsistensi para pelaksana kebijakan dan perilaku sasaran.²

Didalam melaksanakan kebijakan publik yang telah dibuat pemerintah harus berorientasi kepada rakyat. Hal ini juga yang harus dipikirkan oleh setiap kepala daerah, karena pada dasarnya rakyat adalah pemberi amanah dan yang mempunyai kedaulatan tertinggi di negara ini. Sehingga setiap pemerintah daerah, melalui aparturnya tidak menjadikan dirinya yang berkuasa, namun memposisikan dirinya sebagai orang yang bekerja untuk rakyat. Salah satunya adalah tercermin dalam hal pelayanan publik, setiap daerah harus membuat kebijakan yang mampu menyediakan pelayanan yang prima bagi kebutuhan masyarakat yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Kata pelayanan publik merefleksikan interaksi antara kewenangan daerah sebagai penyedia layanan dan sebagai institusi politik. Sebagai penyedia layanan,

¹ Suharno, *Dasar-Dasar kebijakan Publik: Kajian Proses dan Analisis Kebijakan*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013), hlm. 169.

² *ibid*

pemerintah daerah bertujuan memenuhi permintaan, kebutuhan dan aspirasi dari masyarakatnya dan layanan yang diberikan harus disesuaikan dengan kebijakan publik yang telah ditentukan sebelumnya. Sebagai institusi politik, pemerintah daerah menjadi tempat dimana pilihan-pilihan kebijakan publik dilahirkan dan bertanggung jawab membuat pilihan-pilihan, baik menyangkut sifat maupun tingkat layanan yang disediakan. Sebagai institusi politik pemerintah daerah juga berperan sebagai sarana untuk mengungkapkan suara-suara di daerah, memberikan ekspresi terhadap aspirasi dan keinginan masyarakatnya memaksimalkan kedua peran pemerintah daerah tersebut harus muncul terutama dari dalam pemerintah daerah sendiri dengan melakukan berbagai langkah-langkah perubahan terkait dengan aspek struktur organisasi dan manajemen, perubahan prosedur administrasi, perubahan manajemen kepegawaian dan pola komunikasi dengan masyarakatnya.³

Pemerintah sebagai penyedia layanan, harus benar-benar paham apa yang dibutuhkan oleh warganya. Salah satu pelayanan publik yang sentral bagi masyarakat pada saat ini adalah pelayanan transportasi. Transportasi publik penting untuk dijadikan sebagai sarana angkutan publik yang dibutuhkan masyarakat, baik untuk bekerja, sekolah atau untuk rekreasi dan sebagainya. Oleh karena itu pemerintah, terutama pemerintah daerah dituntut untuk menyediakan transportasi publik yang nyaman dan aman sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu penyediaan transportasi publik adalah salah satu solusi untuk mengurangi kemacetan yang terjadi di jalan raya.

³ Sangkala, *Dimensi-Dimensi Manajemen Publik*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2012), hlm.208.

Pentingnya penyediaan transportasi publik oleh suatu pemerintah daerah menandakan bahwa pemerintah daerah peduli terhadap rakyatnya. Karena adanya transportasi publik yang disediakan oleh pemerintah tentunya akan berbeda apabila menggunakan transportasi yang disediakan oleh pihak swasta, minimal dari segi harga yang jauh lebih murah karena pemerintah tidak berorientasi profit semata namun lebih ke pelayanan. Selain itu dengan banyaknya aktivitas yang dilakukan oleh penduduk suatu daerah, transportasi publik akan menjadi salah satu penunjang bagi setiap aktivitasnya. Misalnya saja orang yang pergi bekerja, melakukan kegiatan bisnis, berangkat sekolah dan lain-lain.

Ketika mobilitas penduduk suatu daerah itu sangat tinggi dan cenderung akan menimbulkan kemacetan, maka salah satu solusinya adalah penyediaan transportasi publik yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah. Hal inilah yang melatar belakangi Pemerintah Kota Bandung yang dipimpin oleh Ridwan Kamil mengeluarkan kebijakan angkutan Bus Sekolah gratis bagi siswa-siswi di Kota Bandung. Kebijakan ini tertuang dalam Keputusan Wali Kota Bandung Nomor:551/Kep. 573-DisHub/2014 tentang penetapan jalur operasional bus sekolah di Kota Bandung. Kebijakan ini adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Bandung dengan tujuan agar kemacetan yang disebabkan oleh pelajar menjadi berkurang.

Walaupun kebijakan ini belum tentu dapat mengatasi masalah kemacetan di Kota Bandung. Namun yang jelas dengan adanya kebijakan ini para siswa yang bersekolah di Kota Bandung akan terlayani dengan bus ini. Namun apakah setiap sekolah yang ada di Kota Bandung akan terjangkau dengan bus ini ? Karena

berdasarkan data yang berasal dari dinas pendidikan ada 1470 sekolah yang ada di

Kota Bandung, seperti tabel berikut :

Tabel 1.1.
Jumlah Sekolah Di Kota Bandung

Wilayah Kecamatan	2014							
	Banyaknya Sekolah Menurut Kecamatan Dan Tingkatan Sekolah Di Kota Bandung Tahun 2014 (Unit)							
	SD Negeri	SD Swasta	SMP Negeri	SMP Swasta	SMU Negeri	SMU Swasta	SMK Negeri	SMK Swasta
Bandung Kulon	35	6	-	5	0	2	0	3
Babakan Cuparay	36	8	4	2	1	0	0	0
Bojongloa Kaler	16	5	2	6	1	5	0	5
Bojongloa Kidul	16	6	1	6	0	2	0	6
Astana Anyar	26	5	1	4	0	2	0	7
Regol	26	9	4	8	1	5	0	3
Lengkong	16	13	2	8	3	10	5	14
Bandung Kidul	10	1	1	2	0	3	0	1
Buah Batu	23	3	2	3	1	2	5	4
Rancasari	13	1	3	1	1	0	0	0
Gedebage	9	0	0	0	1	0	1	1
Cibiru	23	2	1	4	1	5	0	5
Panyileukan	8	2	0	3	0	2	0	2
Ujung Berung	18	2	2	7	1	3	0	5
Cinambo	6	0	0	1	0	0	0	2
Arcamanik	15	6	1	6	0	3	0	2
Antapani	17	3	2	3	1	1	1	3
Mandalajati	20	1	1	3	0	2	0	1
Kiaracondong	38	3	2	6	2	3	0	10
Batununggal	30	5	3	4	0	0	0	0
Sumur Bandung	17	6	2	6	2	5	1	5
Andir	18	17	4	14	2	13	0	4
Cicendo	28	13	3	14	2	9	2	7
Bandung Wetan	4	16	4	9	1	5	1	2
Cibeunying Kidul	36	6	1	6	2	1	1	3
Cibeunying Kaler	16	4	1	5	0	5	0	9
Coblong	35	7	2	9	3	10	0	3
Sukajadi	27	8	1	2	0	1	0	2
Sukasari	227	7	3	7	1	6	0	4
Cidadap	11	4	1	6	0	3	0	2
Kota Bandung	820	169	54	160	27	108	17	115

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Bandung (data diolah kembali)

Berdasarkan data itu, maka siswa yang bersekolah di Kota Bandung tentunya akan banyak sekali. Salah satunya adalah siswa yang bersekolah di level Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan sederajat yang berjumlah 95.246 siswa.⁴ Dengan jumlah siswa sebanyak itu bus sekolah ini harus mampu memenuhi pelayanan transportasi publik terhadap siswa tersebut. Pada saat ini jumlah armada bus yang melayani siswa sekolah tersebut adalah 26 bus dengan jalur operasional sebagai berikut:

Tabel 1.2.
Jalur Bus Sekolah Gratis di Kota Bandung

Jalur Operasional	Rute
Setiabudi - Pasir Koja	Setiabudi-Terminal Ledeng-Sukajadi-Pasir kaliki-Pajajaran-Cicendo-kebon Kawung-Astana Anyar-Pasir Koja
Dago – Kebon Kelapa	Terminal Dago-Juanda-Merdeka-Lembong-Lengkong Besar-Pungkur-Terminal Kebon Kelapa
Kopo – Kebon Kelapa	Kopo-Leuwipanjang-Kopo (RS. Immanuel)-Pasir Koja-Kebon Kelapa
Cibiru – Djunjunan	Cibiru-Ujungberung-Cicaheum-gasibu-Djunjunan
Arcamanik – Kebon Kawung	Arcamanik-Antapani-Jl. Jakarta-Supratman-RE. Martadinata-Merdeka-Wastukencana-Cicendo-Kebon Kawung
Cibiru – Asia Afrika	Cibiru-Soekarno Hatta-Kiaracandong-Buahbatu-Karapitan-Asia Afrika
Cibiru – Dago	Cibiru-Soekarno Hatta-Kiaracandong-Jl. Jakarta-Supratman-Juanda-terminal Dago
Cibiru - Cibeureum	Cibiru-Soekarno Hatta-Cibeureum
Peta - Jamika	Peta-BKR-Pelajar Pejuang 45- Laskar Wanita (Laswi)-RE. Martadinata-Merdeka-Wastukencana-Pajajaran-AR. Saleh-garuda-Sudirman-Jamika.

Sumber : Pemerintah Kota Bandung (data diolah kembali)

Namun dengan yang ada dengan jumlah angkutan hanya 26 bus yang ada apakah bisa melayani seluruh siswa yang ada di Kota Bandung ? Dan yang terpenting

⁴ Anonim, *Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendidikan Kota Bandung tahun 2014*

apakah dengan adanya bus sekolah gratis ini kualitas pelayanan transportasi publik di Kota Bandung bagi siswa SMA/SMK di Kota Bandung akan meningkat ?

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk meneliti tentang hal tersebut, dengan mengambil judul “**Implementasi Kebijakan Bus Sekolah Gratis Terhadap Kualitas Pelayanan Transportasi Publik Bagi SMA/SMK di Kota Bandung**”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, dapat disimpulkan bahwa ada beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi, diantaranya:

- a. Kebijakan penyediaan angkutan bus sekolah gratis yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Bandung adalah sebuah kebijakan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Bandung. Melalui Keputusan Wali Kota Bandung Nomor:551/Kep. 573-DisHub/2014 tentang penetapan jalur operasional bus sekolah di Kota Bandung. Kemudian yang disusul dengan Keputusan Wali Kota Bandung Nomor: 551/Kep.274-DisHub/2015 tentang pengembangan jalur operasional bus sekolah di Kota Bandung. Kebijakan ini diharapkan mengurangi kemacetan yang ada di Kota Bandung. Namun kebijakan ini akan menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaannya apabila setiap stakeholders, mulai dari pengelola bus sekolah sampai dengan target group yaitu para peserta didik tidak mendukung kebijakan ini.
- b. Penambahan rute angkutan bis gratis gratis dari dua menjadi sembilan jalur belum tentu membuat kualitas pelayanan akan meningkat. Karena masih banyak sekolah-sekolah yang masih belum terjangkau.

- c. Ketika kebijakan angkutan bus sekolah gratis ini digulirkan, maka tentunya ada harapan dari masyarakat. Salah satunya adalah adanya peningkatan kualitas pelayanan transportasi publik dari sebelum kebijakan ini dibuat dan setelah kebijakan ini dibuat. Khususnya bagi Peserta Didik SMA/SMK di Kota Bandung.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka dapat ditarik rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

- a. Seberapa besar pengaruh isi kebijakan angkutan bus sekolah gratis di Kota Bandung ?
- b. Seberapa besar pengaruh lingkungan kebijakan angkutan bus sekolah gratis saat ini bagi peserta didik SMA/SMK di Kota Bandung ?
- c. Seberapa besar signifikansi isi kebijakan angkutan bus sekolah gratis terhadap lingkungan kebijakan transportasi publik bagi peserta didik SMA/SMK di Kota Bandung ?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penulisan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui isi kebijakan angkutan bus sekolah gratis di Kota Bandung.

- b. Untuk mengetahui lingkungan kebijakan angkutan bus sekolah gratis saat ini bagi peserta didik SMA/SMK di Kota Bandung.
- c. Untuk mengetahui Seberapa besar signifikansi isi kebijakan angkutan bus sekolah gratis terhadap lingkungan kebijakan transportasi publik bagi peserta didik SMA/SMK di Kota Bandung.

E. Kegunaan Penelitian

Dari penelitian ini, penulis berharap dapat berguna bagi setiap orang. Adapun kegunaan penelitian ini, diantaranya:

- a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penulis berharap penelitian ini dapat menambah khazanah keilmuan, khususnya pada ilmu Administrasi Publik. Terutama terfokus pada signifikansi kebijakan angkutan bus sekolah gratis terhadap kualitas pelayanan transportasi publik bagi peserta didik SMA/SMK di Kota Bandung. Sehingga dengan penelitian ini, dapat melihat gambaran mengenai implementasi tentang kebijakan tersebut.

- b. Kegunaan Praktis

- a) Bagi Penulis

Diharapkan penulis mendapatkan tambahan pengetahuan yang selama ini hanya didapat penulis secara teoritis selama di bangku perkuliahan jurusan Administrasi Publik, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. Dan diharapkan menjadi bekal untuk mengaplikasikan menjadi

seorang birokrat atau dosen nantinya, mengenai penelitian yang telah dilakukan.

b) Bagi Pemerintah Kota Bandung

Diharapkan dengan adanya penelitian ini, pemerintah Kota Bandung, terutama Dinas Perhubungan Kota Bandung dapat melihat pelaksanaan kebijakan yang telah dikeluarkan berdampak baik atau tidak bagi warganya. Sehingga penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk mengevaluasi kebijakan bus sekolah gratis.

c) Bagi Masyarakat

Semoga dengan adanya penelitian ini, diharapkan masyarakat lebih memahami kondisi pelayanan transportasi publik, khususnya kebijakan mengenai angkutan bus sekolah gratis ini. Sehingga masyarakat kedepannya diharapkan untuk lebih peduli dengan sarana transportasi publik.

F. Kerangka Pemikiran

Kebijakan publik merupakan salah satu kajian pada ilmu Administrasi Publik. Kebijakan publik dibuat sebagai salah satu cara untuk mencapai visi pemerintah, baik sebagai institusi politik maupun sebagai pelayan masyarakat. Sebagai institusi politik pemerintah harus membuat kebijakan untuk memperlancar setiap program yang hendak dilaksanakan. Demikian pula sebagai organisasi pelayanan masyarakat, pemerintah harus membuat kebijakan yang berorientasi kepada masyarakat. Oleh karena itu kebijakan publik harus dibuat sesuai dengan kebutuhan

masyarakat. Salah satu yang perlu diperhatikan oleh pemerintah dalam membuat kebijakan adalah membuat masyarakat nyaman dengan kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah.

Setelah suatu kebijakan dibuat, maka selanjutnya pemerintah adalah harus melaksanakan kebijakan tersebut. Pelaksanaan kebijakan atau implementasi kebijakan ini penting sebagai sebuah alat untuk “mengeksekusi” program. Adapun pengertian implementasi kebijakan menurut Mazmanian dan Sabatier adalah:

“Implementasi Kebijakan adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk Undang-Undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan Badan penelitian”.⁵

Implementasi kebijakan publik, sejatinya tidak akan berhasil tanpa adanya faktor-faktor yang mempengaruhinya atau disebut sebagai sebuah indikator keberhasilan. Pada penelitian ini, peneliti merujuk teori yang dikeluarkan oleh Marilee S. Grindle. Didalam teorinya dikatakan bahwa suatu implementasi kebijakan publik, ditentukan oleh tingkat implementability kebijakan itu sendiri. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan tersebut, yaitu:

a. *Content Policy* (Isi kebijakan)

1. Sejauhmana kepentingan kelompok sasaran atau target groups, termuat dalam isi kebijakan. Sebuah kebijakan yang didalamnya memuat kepentingan

⁵ Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier, *Implementation and Public* (California, Scot, Foresmen and Company, 1983), hlm.61

kelompok kelompok sasaran akan lebih mudah diimplementasikan, daripada kebijakan yang tidak memuat kelompok sasaran.

2. Jenis manfaat yang diterima oleh target groups, tentunya kebijakan akan lebih bermanfaat jika sesuai dengan kebutuhan target groups.
3. Sejauhmana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan dengan tujuan untuk mewujudkan perubahan fisik, seperti membangun jembatan atau jalan raya akan lebih mudah diimplementasikan daripada kebijakan yang ditujukan untuk meningkatkan sumber daya manusia.
4. Apakah letak program sudah tepat ? Dalam hal ini yang dimaksud adalah apakah implementor kebijakan tersebut sudah tepat diserahkan ke sebuah institusi. Sebagai contoh, misalnya apakah kebijakan konversi nilai UAN, tepat jika dipegang oleh departemen sosial ?
5. Apakah kebijakan telah menyebut implementornya dengan rinci ? Dalam hal ini instansi-instansi yang terkait sebagai implementor kebijakan ini diperlukan selain untuk memudahkan implementor untuk melakukan koordinasi, juga untuk melakukan pengawasan oleh publik ?
6. Apakah sebuah program didukung oleh sumber daya yang memadai ? kebijakan yang tidak didukung oleh sumberdaya yang memadai akan mendapat hambatan dalam tahap implementasi . Sumber daya yang dimaksud dapat berupa sumber daya finansial maupun kompetensi dari implementor.

b. Context Policy (Lingkungan Kebijakan)

Lingkungan kebijakan (*context policy of implementation*), mencakup tiga aspek berikut:

1. Seberapa kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan.
2. Karakteristik institusi dan rezim yang berkuasa.
3. Tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.

Pemerintah dalam membuat kebijakan publik harus berdasarkan pada kepentingan publik. Salah satunya adalah membuat pelayanan publik yang nyaman bagi masyarakat. Pelayanan Publik menurut Amin Ibrahim dalam bukunya “Teori dan Konsep Pelayanan Publik Serta Implementasinya” menyatakan bahwa pelayanan publik adalah segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah pusat, di daerah dan lingkungan Badan Milik Usaha Milik Negara atau Daerah Dalam bentuk barang, dan atau jasa baik dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Fitzsimmons dalam Sedarmayanti,⁶ bahwa ada lima dimensi dari kualitas pelayanan, Yaitu:

a. *Reliability* (handal)

Reliability adalah kemampuan untuk memberi secara tepat dan benar, jenis pelayanan yang telah dijanjikan kepada konsumen/pelanggan.

b. *Responsiveness* (Pertanggungjawaban)

Responsiveness yaitu kesadaran atau keinginan membantu konsumen dan memberikan pelayanan.

c. *Assurance* (jaminan)

⁶ Sedarmayanti, *Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan (mewujudkan Pelayanan Prima dan Kepemerintahan yang Baik)* cetakan kedua (Bandung:Refika Aditama,2010), hlm. 254

Assurance yaitu berupa pengetahuan/wawasan, kesopansantunan, kepercayaan diri dari pemberi layanan, respek terhadap konsumen.

d. *Empathy* (empati)

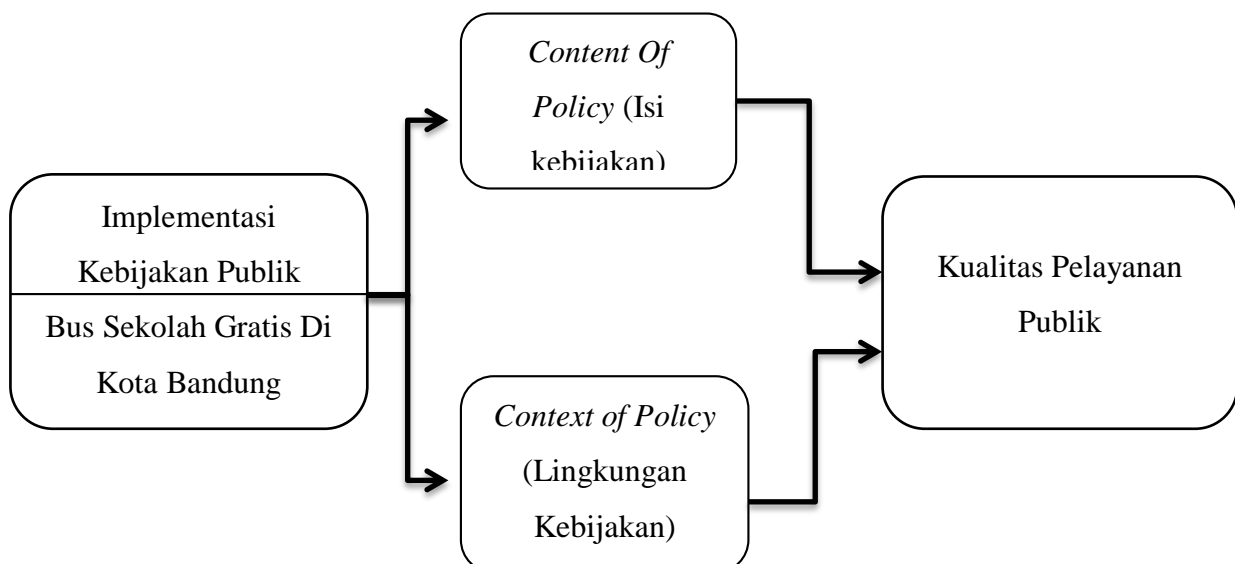
Empathy adalah kemampuan pemeberi layanan untuk melakukan pendekatan, memberi perlindungan, berusaha mengetahui keinginan dan kebutuhan konsumen

e. *Tangibles* (terjamah)

Tangibles adalah Penampilan pegawai dan fasilitas fisik lainnya, seperti peralatan/perlengkapan yang menunjang pelayanan.

Pemaparan diatas merupakan pemakaran peneliti mengenai tema penelitian yang diangkat pada penelitian ini. Adapun yang menjadi variabel X nya adalah implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Grindle, sementara variable Y nya adalah kualitas pelayanan yang dikemukakan oleh Fitzsimmon. Apabila digambarkan dalam bentuk bagan, maka kerangka pemikirannya adalah sebagai berikut:

Gambar Kerangka Pemikiran penelitian



Gambar 1.1.

G. Hipotesis

Menurut Nasution “hipotesis adalah pernyataan tentatif yang merupakan dugaan atau terkaan tentang apa saja yang kita amati dalam usaha untuk memahaminya”.⁷

a. Hipotesis 1

H_0 : Terdapat signifikansi isi kebijakan angkutan bus sekolah gratis

H_a : Terdapat signifikansi lingkungan kebijakan angkutan bus sekolah gratis

b. Hipotesis 2

H_0 : Terdapat signifikansi isi kebijakan transportasi publik bagi siswa di Kota Bandung.

H_a : Terdapat signifikansi lingkungan kebijakan transportasi publik bagi siswa di kota Bandung.

c. Hipotesis 3

H_0 : Terdapat signifikansi isi kebijakan angkutan bus sekolah gratis terhadap lingkungan kebijakan transportasi publik bagi siswa di Kota Bandung.

H_a : Terdapat signifikansi isi kebijakan angkutan bus sekolah gratis terhadap lingkungan kebijakan transportasi publik bagi siswa di Kota Bandung.

⁷ Nasution, Metode Research (Penelitian Ilmiah Cetakan Keempat, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), hlm.38